

Daftar Pustaka

Buku :

Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017

Eriyanto. (2013). *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System: a handbook for development practitioners: World Bank Publications*.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Tahun 2012-2017

Public Service Commision. (2008). *Basic Concepts in Monitoring and Evaluation. South Africa: Public Service Commision (PSC)*.

Yusuf, M. A (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

Jurnal :

Annafie, K., & Nurmandi, A. (2017). Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 304-338.

Antoro, K. S. (2015). Analisis Kritis Substansi Dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 1(1).

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Baharudin, B. (2016). Desain Daerah Khusus/Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 85-92.

Dardias, B. (2012). Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua. *Opini Harian Kompas, Tu-lisan inis*, 14.

Faradita, N. (2017). Implementation Of Law Number 13 Year 2012 Regarding Special Regency Of Yogyakarta. *E-Civics*, 6(4).

Indrakrista, N. B. Pers Mengawal Demokrasi Daerah: Analisis Pemberitaan Implementasi Dana Keistimewaan di Harian Tribun Jogja. *JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, 18(3), 196-209.

Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 8(1), pp-1.

Khaerina, H. (2017). Perbandingan Kebijakan Desentralisasi Asimetris antara Filipina Selatan dan Indonesia. *Peperangan Asimetrik*, 3(2).

Kuncahyo, D. (2017). Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Basis Otonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1).

Kurniadi, B. D. (2012). Desentralisasi Asimetris di Indonesia . *In a Seminar held by Lembaga*.

Nurcholis, H. (2007). Pemerintahan Lokal Asimetris dan Model Pengawasannya. *In Proseding Seminar*.

Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28 (1).

Rismawanto, Reza Z. (2016). *Monitoring Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi Dan Air Minum Perkotaan (Pisamp) Daerah Istimewa Yogyakarta Di Sewon Bantul Yogyakarta Tahun 2014*. 2016. Yogyakarta: UMY.

Sukmadinata, N. S. (2007). Metode penelitian. *Bandung: PT Remaja Rosda Karya*.

Sapitri, L. (2014). Evaluasi Strategi dengan Pendekatan Balanced Scorecard untuk Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Satriawan, H, Bismar (2017). Analisa Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017.

Suryaningsum, S., Effendi, M., Gusaptono, R. H., & Sultan, S. (2014). Penguatan Ekonomi Kebudayaan Diy Berbasis Anggaran Keuangan Danais.

Syamsi, N. (2014). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Dan Monitoring Surat Menyurat Bagian Surat Masuk Berbasis Web.

Widoyoko, E. P. (2005). *Evaluasi Program Pelatihan*.

Skripsi :

Afriani, N. (2017). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Berkarakter*. Skripsi tidak dipublikasikan.

Hummam, A. S. (2016). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Dalam Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Kelompok Kesenian Tari Angguk)*. Skripsi tidak dipublikasikan.

Jami'at, Cecep. (2016). *Analisis Fungsi Pengawasan Legislatif (DPRD) Terhadap Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. Skripsi tidak dipublikasikan.

L, Indra. M. A (2016). *Monitoring BPJS Kesehatan Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014-2015*. Skripsi tidak dipublikasikan.

Pusra, M. C. (2016, dalam Mubarak Z. 2010:2). *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Oleh Muhammadiyah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi tidak dipublikasikan.

Thesis :

Sakir. (2015). *Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014*. Thesis tidak dipublikasikan.

Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Media Online

Aditya, I. (2017). Menagih Transparansi Dana Keistimewaan. (krjogja.com/web/news/read/30100/Menagih_Transparansi_Dana_Keistimewaan, diakses 10 Oktober 2017 21.41).

Anggriawan, F. 2015. Pencairan Dana Keistimewaan DIY Masih Dipersulit. (<https://news.okezone.com/read/2015/02/06/340/1102232/pencairan-dana-keistimewaann-diy-masih-dipersulit>, diakses pada 10 oktober 2017 20.56).

Kuntadi.2017. Dana Keistimewaan Besar, Kemiskinan di DIY Masih Tinggi. (<https://daerahsindonews.com/read/125275/189/dana-keistimewaan-besar-kemiskinan-di-diy-masih-tinggi-1510046909>, diakses pada 7 Maret 2018 10:25).

Raharjo, E. 2017. Ponpes di Yogyakarta Akui Kesulitan Mengakses Dana Keistimewaan. (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3519358/ponpes-di-yogyakarta-akui-kesulitan-mengakses-dana-keistimewaan>, diakses pada 10 oktober 2017 21.36)

Dokumen:

Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan

Koran :

Kur. (2017, Mei 27). Masih Sisakan Banyak Masalah, Tribun Jogja, h.13